

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan di tingkat perangkat daerah terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi perangkat daerah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah, acuan dalam pembuatan rencana kerja, menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi, serta untuk mempertajam

arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung periode 2018-2023. Kabupaten Belitung sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Hal tersebut selanjutnya diamanatkan untuk daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Daerah (RPD) periode tahun 2024-2026.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk guna melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan fungsi Lainnya di Kabupaten Belitung melaksanakan penyusunan Renstra tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026.

Renstra perangkat daerah harus memiliki keterkaitan dengan RPD 2024-2026. Renstra disusun berpedoman pada RPD sesuai tugas dan

fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi dan Nasional.

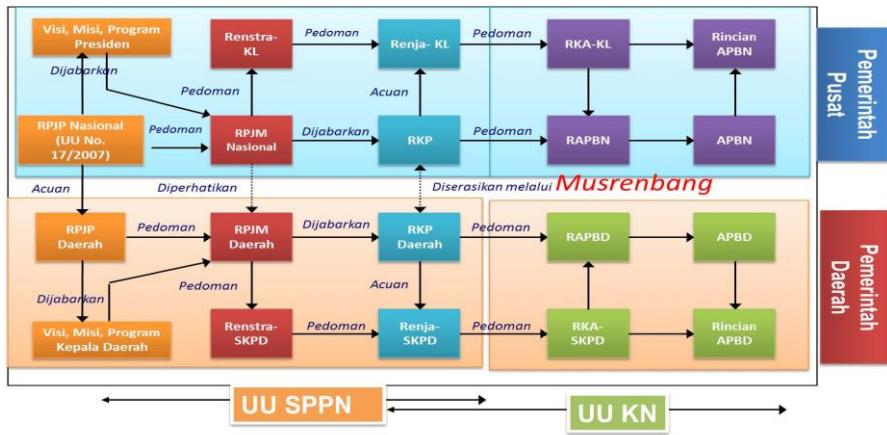
Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk guna melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang lainnya di Kabupaten Belitung melaksanakan penyusunan Renstra tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, maka Renstra Kecamatan Sijuk disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2024-2026.

Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD. Dalam hal ini Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung disusun untuk digunakan pada masa transisi perencanaan selama 3 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1



Rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD yang memuat Program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sijuk.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan atau Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung 2024- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenkelatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung 2024-2026 adalah untuk memberikan arahan dan pedoman perangkat daerah serta seluruh aparatur dalam melaksanakan tugasnya dengan membangun komitmen Bersama untuk mewujutkan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam menentukan prioritas dibidang perncanaan sehingga tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung adalah:

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan Sijuk dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sijuk.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra perangkat daerah provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang dan Penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Sijuk.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat strategi dan kebijakan pembangunan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini memuat rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung periode 2024- 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Dalam bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang urusan Pemerintahan diibidang Pelayanan kepada Masyarakat dan mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- d. penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- e. penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, sarana prasarana, Aparatur Sipil Negara, rumah tangga, keuangan dan aset;
- f. penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung mempunyai Sumber Daya Manusia sebanyak 17 Orang, yang mempunyai latar belakang Pendidikan S1, D3, dan SMA dan sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan peralatan Kantor serta perlengkapannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurun waktu lima tahun sebelumnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Sijuk dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan urusan Pelayanan kepada Masyarakat dan ketersediaan sarana dan Prasarana pendukung seperti : dibangunnya Kantor Kecamatan Sijuk 2 (dua) Tingkat, pada tahun 2015.

Dalam Pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023 terdapat Hambatan Utama Yaitu :

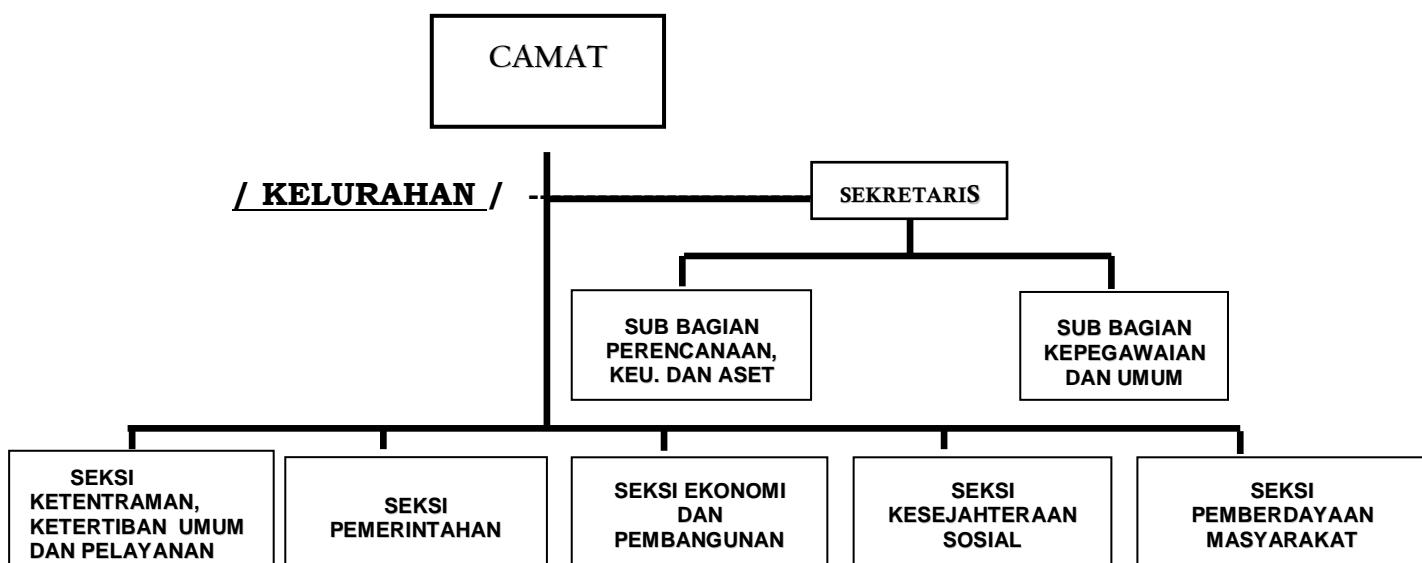
1. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.
2. Belum memadai Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Keterbatasan Pagu Anggaran.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Dimana Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Sijuk diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

**Bagan 2.1.1
Struktur Organisasi
Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung**

**Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Kecamatan.**



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Badau diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Belitung Nomor 63 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas dan Fungsi dibawah Camat adalah sebagai berikut :

1. Camat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam Bab III Tugas dan Fungsi Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengoordinasikan upaya dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati ;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diulakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai berikut:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan ; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelimpahan kewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati **Pasal 6** disebutkan ;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

Sebagai Berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai lingkup tugasnya ;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- d. Penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di kecamatan ;
- e. Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, sarana prasarana, Aparatur Sipil Negara, rumah tangga, Keuangan dan Aset ;
- f. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan ; dan
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Penjabaran Tugas dan Fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Kabupaten Belitung sebagai berikut :

2. Sekretaris

Tugas : Membantu Camat dalam memberikan pelayanan Administratif dan Tekhnis pada semua unsur dilingkungan Kecamatan.

Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan ;
b. Penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan kecamatan ;
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset ;
d. Pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara ;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya ; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelayanan

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman,ketertiban umum dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran urusan Ketentraman Ketertiban umum dan pelayanan;
b. Penyiapan Bahan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta aparat satuan tugas perlindungan masyarakat ;
c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi sosial politik dan kemasyarakatan lainnya ;
d. Penyiapan bahan penyusunan standar operasional

- prosedur pelayanan dan standar pelayanan ;
- e. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan ;
 - f. Pelaksanaan pemberian layanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati ;
 - g. Penyiapan bahan penetapan pelaksanaan teknis urusan pelayanan ;
 - h. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan ;
 - i. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman ketertiban umum dan pelayanan ;
 - j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya ;
 - k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya ; dan
 - l. Pelaksanaan tuga - tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Seksi Pemerintahan.

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan ;

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan program di bidang Pemerintahan ;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan keagrariaan ;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi desa / kelurahan ;
 - e. Penyelenggaraan pengawasan umum terhadap pelaksanaan APBDesa ;
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan ;
 - g. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya ;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan

- terkait bidang tugasnya ; dan
- i. Pelaksanaan tugas – tugas lain yg diberikan oleh atasan.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana prasarana fisik, perekonomian dan produksi diwilayah Kecamatan ;
b. penyiapan bahan penyusunan program perencanaan pembangunan ;
c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan ;
d. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya ;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya ; dan
f. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan social, pendidikan, kepemudaan, olahraga dan keagamaan ;

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan bantuan social, kepemudaan dan olahraga ;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan dan pendidikan ;
c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- urusan kesejahteraan sosial ;
- d. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya ;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya ; dan
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yg diberikan oleh atasan.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan masyarakat ;

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup ;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan kebudayaan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat ;
c. Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan masyarakat ;
d. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya ;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya ; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 SUMBER DAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

a. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Sijuk Pada Desember 2022, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 17 Pegawai, yang terdiri dari 13 Orang Pegawai Laki-laki (

76,47 %) dan 4 Orang Pegawai Perempuan (22,52 %). Berdasarkan Jenjang Pendidikan, untuk ASN Kecamatan Sijuk didominasi oleh Lulusan Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi yaitu Lulusan S1, D3, Dengan Jumlah total sebanyak 8 Orang (47,06%). Sisanya berupa Lulusan SMA sebanyak 9 Orang (52,94%) Jumlah dan Komposisi Pegawai pada Kecamatan Sijuk Tahun 2022 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1

Alokasi Pegawai Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Tahun 2022.

| No | Unit Kerja | Jumlah | | Ket |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|
| | | Lk | Pr | |
| 1. | Camat | 1 | - | |
| 2. | Sekretaris | 1 | - | |
| | 1. Subbag Kepegawaian dan Umum | - | 1 | |
| | 2. Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset | 1 | - | |
| | 3. Fungsional Umum | 1 | 2 | |
| | 4. Non ASN | 2 | - | |
| 3. | Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan | 1 | - | |
| | 1. Fungsional Umum | 1 | - | |
| 4. | Kasi Pemerintahan | - | 1 | |
| | 1. Fungsional Umum | 3 | - | |
| | 2. Non ASN | - | 1 | |
| 5. | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | - | - | Belum ada |
| | 1. Fungsional Umum | 1 | - | |
| | 2. Non ASN | 1 | - | |
| 6. | Kasi Kesejahteraan Sosial | - | - | Belum ada |
| | 1. Fungsional Umum | 2 | - | |
| 7. | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | 1 | - | |
| | 1. Fungsional Umum | - | - | |
| | 2. Non ASN | | 1 | |
| Jumlah | | 16 | 6 | |

Tabel 2.2

Jumlah SDM Kecamatan Sijuk Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun
2022

| Rincian | Jumlah PNS | | Jumlah CPNS | | Jumlah Total |
|---------------|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |
| Golongan IV | 2 | - | - | - | 2 |
| Golongan III | 9 | 2 | - | - | 11 |
| Golongan II | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Golongan I | - | - | - | - | 0 |
| Jumlah | | | - | - | 17 |

Tabel 2.3

Jumlah SDM Kecamatan Sijuk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun
2022

| No. | Rincian | Jumlah PNS | | Jumlah CPNS | | Jumlah Total |
|---------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | S-2 | - | - | - | - | - |
| 2 | S-1 | 4 | 1 | - | - | 5 |
| 3 | D-IV | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 4 | D-III | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | D-II | - | - | - | - | - |
| 6 | D-1 | - | - | - | - | - |
| 7 | SLTA | 7 | 2 | - | - | 9 |
| 8 | SLTP | - | - | - | - | - |
| 9 | SD | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 13 | 4 | - | - | 17 |

Tabel 2.4

Jumlah SDM Kecamatan Sijuk Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Terakhir Tahun 2022

| GOL PNS/CPNS | Pendidikan Terakhir | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|
| | S1 | | D IV | | DIII | | SMA | |
| | L | P | L | P | L | P | L | P |
| PNS Gol. IV | 1 | | 1 | | | | | |
| PNS Gol. III | 3 | | | 1 | 1 | | 5 | 1 |
| PNS Gol. II | | 1 | | | | | 2 | 1 |
| PNS Gol. I | | | | | | | | |
| CPNS Gol. IV | | | | | | | | |
| CPNS Gol. III | | | | | | | | |
| CPNS Gol. II | | | | | | | | |
| CPNS Gol. I | | | | | | | | |
| Jumlah | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 2 |

Tabel 2.5

Jumlah SDM Kecamatan Sijuk Tahun 2022 Yang Telah Mengikuti Diklat

| NO | Jenis Diklat | Jumlah Pegawai | | Telah Mengikuti Dan Lulus | Yang Belum Mengikuti |
|----|--|----------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | L | P | | |
| 1 | Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II | | | | |
| 2 | Pelatihan Kepemimpinan Administrator | 1 | | 1 | 1 |
| 3 | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Diklat Fungsional | | | | |
| 5 | Diklat Barang dan Jasa | 2 | 1 | 3 | 5 |

2.2.2 Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung Operasional dan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk, Sarana dan Prasarana aparatur yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk berupa Sarana Transportasi, Sarana Telekomunikasi, serta Peralatan dan perlengkapan kerja.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah
Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung
Sampai dengan 2022

| No | Jenis Barang | Satuan | Jumlah Yang ada | Jumlah Ideal | Kurang/ Cukup | Kondisi Baik | Kondisi Rusak Ringan | Kondisi Rusak Barat | Ket |
|----|-------------------------------|--------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|-----|
| 1 | Bangunan Gedung Ktr. Cmt | M2 | 1 | 1 | Cukup | B | | | |
| 2 | Bangunan Gedung Rapat | M2 | 1 | 1 | Cukup | | | RB | |
| 3 | Station Wagon(Mobil Kijang) | Buah | 1 | 1 | Cukup | | | RB | |
| 4 | Station Wagon Mobil Avanza | Buah | 1 | 1 | Cukup | B | | | |
| 5 | Station Wagon(Mobil Truck) | Buah | 1 | 1 | Cukup | B | | | |
| 6 | Motor Dinas Pegawai | Buah | 9 | 11 | Kurang | 2 B | 4 RR | 3 RB | |
| 7 | Meja Rapat | Buah | 4 | 8 | Kurang | | RR | | |
| 8 | Kursi Rapat (Plastik / Lipat) | Buah | 100 | 200 | Kurang | | RR | | |
| 9 | Kursi Putar (Kursi Kerja) | Buah | 15 | 20 | Kurang | | RR | | |
| 10 | Sound System | Set | 1 | 1 | Cukup | | RR | | |
| 11 | Mimbar / Podium | Buah | 1 | 1 | Cukup | | | RB | |
| 12 | Bangunan Tempat Ibadah | Buah | 1 | 1 | Cukup | B | | | |
| 13 | Tempat Parkir Mobil/Motor | Buah | 1 | 2 | Kurang | | RR | | |
| 14 | Ginset | Buah | 1 | 1 | Cukup | B | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------|----|----|--------|------|------|------|--|
| 15 | Hordeng Kantor | 75 M | 75 | 75 | Cukup | B | | | |
| 16 | Kipas Angin | Buah | 3 | 3 | Cukup | | RR | | |
| 17 | AC Split | Buah | 16 | 16 | Cukup | | RR | | |
| 18 | Stationary WaterPump(M.air) | Buah | 1 | 2 | Kurang | | RR | | |
| 19 | Mesin Rumput | Buah | 2 | 2 | Cukup | | RR | | |
| 20 | Komputer PC | Set | 7 | 10 | Kurang | B | | | |
| 21 | Lap Top | Buah | 12 | 12 | Cukup | 10 B | | 2 RB | |
| 22 | Meja ½ Biro (Meja Kerja) | Buah | 15 | 20 | Kurang | B | | | |
| 23 | Meja Pimpong | Buah | 1 | 1 | Cukup | | | B | |
| 24 | Filing Kayu | Set | 10 | 15 | Kurang | | | B | |
| 25 | Filing Kabinet Besi | Set | 10 | 15 | Kurang | B | | | |
| 26 | Lemari Arsip | Set | 10 | 15 | Kurang | B | | | |
| 27 | Lemari Kaca Arsip Piala | Set | 0 | 2 | Kurang | B | | | |
| 28 | TV LED Ruang Tunggu Pelayanan | Set | 1 | 1 | Cukup | B | | | |
| 29 | Kursi Sofa (TAMU) | Set | 2 | 3 | Kurang | B | | | |
| 30 | Grasi Mobil Truck | Set | 1 | 1 | Cukup | B | | | |
| 31 | Tempat Penampung Air | Buah | 2 | 2 | Cukup | B | | | |
| 32 | Printer PC | Set | 6 | 10 | Kurang | 3 B | 3 RB | | |
| 33 | Keyboard | Set | 6 | 10 | Kurang | | RB | | |
| 34 | Lambang Burung Garuda | Buah | 1 | 1 | Cukup | B | | | |
| 35 | Meja ½ Biro Pelayanan | Buah | 1 | 1 | Cukup | B | | | |
| 36 | Kursi Gandeng R. Tunggu | Buah | 5 | 10 | Kurang | B | | | |
| 37 | Mesin Absensi Sidik Jari | Buah | 1 | 1 | Cukup | B | | | |
| 38 | Jam Dinding | Buah | 5 | 10 | Kurang | B | | | |
| 39 | Meja Komputer | Set | 6 | 10 | Kurang | B | | | |
| 40 | Parabola | Set | 1 | 2 | Kurang | B | | | |

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Tahun 2019-2022 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk dibidang Pelayanan Publik/Masyarakat beserta Target Indikator kinerjanya,

Dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Berdasarkan Indeks Kinerja Utama Tahun 2019 - 2023

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke (%) | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke (%) | | | | | Rasio Pencapaian tahun ke (%) | | | | |
|----|---|------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|--------------------------------|-------|------|-------|------|-------------------------------|------|-------|-------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Survei Kepuasan Masyarakat | | | | 80 | 85 | | | | 83,82 | 87,32 | | | | 104% | 103% | | | |
| 2. | Persentase peningkatan prestasi Kecamatan | | | | 2,5 % | 2,5 % | | | | 2,5% | 2,5% | | | | 100% | 100% | | | |
| 3. | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | | | | | | 3,48 | 3,50 | 3,75 | | | 3,49 | 3,145 | n/a | | | 100,2 | 89,86 | n/a |
| 4. | Persentase Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan/ Desa | | | | | | 0,1% | 80% | 85% | | | 100% | 100% | n/a | | | 88 | 125 | n/a |
| 5. | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat hasil Musrenbangcam dapat disetujui di Tingkat Kabupaten | | | | | | 3% | 4% | 5% | | | 8,1% | 100% | n/a | | | 270 | 2.500 | n/a |
| 6. | Persentase Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku | | | | | | 80% | 80% | 85% | | | 100% | 100% | n/a | | | 100 | 125 | n/a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan | | | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100% | 100% | n/a | | | 100 | 100 | n/a |
| 2 | Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah | | | | | | 75 | 75 | 75 | | | 100% | 100% | n/a | | | 133,3 | 133,3 | n/a |
| 3 | Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah | | | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100% | 100% | n/a | | | 100 | 100 | n/a |
| 4 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100% | 100% | n/a | | | 100 | 100 | n/a |
| 5 | Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100% | 100% | n/a | | | 100 | 100 | n/a |
| 6 | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | | | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100% | 100% | n/a | | | 100 | 100 | n/a |
| 7 | Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi | | | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100% | 100% | n/a | | | 100 | 100 | n/a |

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023

| No | Uraian | Anggaran Tahun 2019-2023 | | | | | Realisasi Anggaran 2019-2023 | | | | | Rasio antara realiasi dan anggaran | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----|---|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------|---------------|---------------|------|------------------------------------|------|-------|-------|------|-----------------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan | | | 36.787.650 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | 35.026.500 | 3.000.000 | n/a | | | 95,21 | 100% | n/a | | |
| 2 | Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah | | | 2.500.491.000 | 2.431.915.741 | 2.550.700.000 | | | 2.293.901.363 | 2.353.275.538 | n/a | | | 91,74 | 96,76 | n/a | | |
| 3 | Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah | | | 403.443.250 | 398.125.850 | 340.446.600 | | | 366.031.465 | 377.490.513 | n/a | | | 90,73 | 94,81 | n/a | | |
| 4 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | | | 106.601.280 | 98.901.400 | 51.790.000 | | | 74.212.300 | 89.249.400 | n/a | | | 69,62 | 90,24 | n/a | | |
| 5 | Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | 100.908.060 | 45.993.900 | 65.013.500 | | | 85.386.850 | 45.129.700 | n/a | | | 84,62 | 98,12 | n/a | | |
| 6 | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | | | 66.957.500 | 212.338.650 | 91.128.750 | | | 63.751.000 | 208.121500 | n/a | | | 95,21 | 98,01 | n/a | | |
| 7 | Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi | | | 47.082.750 | 55.395.950 | 28.800.000 | | | 42.258.000 | 49.813.850 | n/a | | | 89,75 | 89,92 | n/a | | |

Dari penjelasan Tabel 2.3.1 diatas pernyataan kinerja Tahun 2021 dan realisasi kinerja pada Tahun 2021, pencapaian yang didapatkan antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

- Pencapaian indikator Nilai Survei Kepuasan masyarakat pada Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh Bagian Organisasi Pemda Kabupaten Belitung Tahun 2022 yaitu nilai SKM 3,145 dari target sebesar 3,50 dengan nilai konversi SKM sebesar 78,63 jika dibandingkan dengan nilai konversi SKM pada tahun 2021 sebesar 86,65 maka terjadi penurunan nilai konversi SKM sebesar 8,02 poin. Hal tersebut di karenakan kecamatan Sijuk keterlambatan dalam menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat ke Bagian Organisasi Kabupaten Belitung.
- Indikator persentase ketercapaian kegiatan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan Sijuk pada tahun 2021 sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan dapat terlaksananya seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sijuk Tahun 2021.
- Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dengan indikator Persentase (%) usulan kegiatan pembangunan oleh masayarakat hasil dari musrenbangcam yang dapat disetujui di tingkat kabupaten pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 4%. Hal ini merupakan hasil dari koordinasi yang baik dari pihak Kecamatan dengan pemerintahan desa dalam menentukan usulan pembangunan yang dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap.
- Pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator persentase desa yang beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2022, hal ini dicapai dikarenakan hasil dari koordinasi, evaluasi, pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan kepada pemerintahan desa dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan RAPBDes yang baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dengan tepat waktu oleh pemerintah desa di Kecamatan Membalong.Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam

dokumen perencanaan selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Belitung. Besaran anggaran diperkirakan antara 0,75 % - 0,95 % dari total APBD Kabupaten Belitung. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sijuk dijelaskan pada Tabel 2.3.2 .

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2022 sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase rasio sudah di atas 81 %.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Salah satu isu strategis yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan visi Renstra Kementerian Dalam Negeri dan telaahan RTRW dan KLHS adalah Terwujudnya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif, pelayanan publik yang optimal **di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut adalah Kecamatan Sijuk berusaha mewujudkan** pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif yang dimulai dari pemerintahan Desa yang ada di lingkup Kecamatan Sijuk.

Tantangan dan peluang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dalam mewujudkan hal di atas guna mendukung Visi Renstra Kementerian Dalam Negeri dan sesuai dengan analisa Telahaan RTRW dan KLHS, antara lain :

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang Kecamatan Sijuk untuk meningkatkan kinerja yang dimulai dari lingkup Desa ;

- 1) Belum optimalnya pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Camat dalam hal perizinan;
- 2) Belum memadai sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

Salah satu isu strategis yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan pengembangan pelayanan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung adalah isu **Kecamatan Sijuk Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang**. Dari luas wilayah, yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain adalah

Sektor Pariwisata, Perikanan Kelautan dan Pertanian.

a. Sektor Pariwisata.

Kecamatan Sijuk yang terletak dipesisir Utara Pulau Belitung memiliki pantai yang indah sehingga sangat memungkinkan dikembangkan wisata bahari yang didukung oleh sektor lainnya.

Potensi pantai yg ada meliputi Tanjung Kelayang, Tanjung Binga, Tanjung Tinggi dan pantai-pantai disekitarnya, Pendauanan, Penyairan, Sengkelik Sijuk dan Batu Bedil Sungai Padang serta tempat lain yang belum tergali. Salah satu promosi yang dilakukan adalah Buang Jong Tanjung kelayang dan Buang Jong Tanjung Tinggi, kegiatan Sail Indonesia dan pekan Wisata kecamatan Sijuk pada bulan Oktober setiap Tahunnya.

Potensi wisata lainnya meliputi wisata Sejarah yaitu Masjid Al Ikhlas Sijuk yang berdiri tahun 1817 yang saat ini masih bertahan keasliannya dan Klenteng Sijuk yang dibangun pada tahun 1814.

Juga wisata alam pemandian umum di Air Seruk , Bukit Paramon Desa Air Selumar sebagai tempat Kemah Wisata, dll.

b. Perikanan dan Kelautan merupakan aset besar yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan serta sub sector kelautannya sendiri. Posisi Kecamatan Sijuk sebagai daerah pesisir sangat perlu dikembangkan dan dijaga kelestariannya dalam kelangsungan hidup manusia dengan mempertimbangkan secara masak terhadap kebijakan yang akan diambil selain potensi ikan disepanjang pesisir Kecamatan Sijuk.

Pengembangan potensi juga perlu didukung dengan sumberdaya manusianya (nelayan) dengan pemberian bantuan sarana kerja, alat tangkap, sarana tangkap, pelatihan manajemen, pengolahan, serta sarana pendukung lainnya misalnya tambat labuh dan dermaga.

c. Pertanian.

Pertanian di Kecamatan Sijuk juga memiliki potensi yang bagus, baik pertaniannya, perkebunan dan peternakan. Pertanian yang mulai diminati masyarakat dalam arti dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik meliputi, sayur mayur, lada, karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, sengon, jati dsb. Demikian juga peternakan seperti ayam, sapi dsb.

d. Pertambangan.

Potensi Pertambangan di Kecamatan Sijuk cukup tinggi yang meliputi tambang kaolin, timah dll. Namun dalam pengelolaannya perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam dan pengaturan dengan ketentuan perundungan yang lebih tegas dan tidak merugikan pihak atau kepentingan lain.

Beberapa potensi tersebut diatas juga harus didukung dengan potensi lain seperti sarana perhubungan, telekomunikasi dan lain-lain.

Selanjutnya, Reformasi birokrasi menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan, tuntutan dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan yang berkembang secara dinamis ini secara berkualitas.

Reformasi birokrasi di Indonesia secara terlembaga pada dasarnya telah diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 yang menggambarkan bahwa pelaksanaan program pembangunan aparatur negara masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Permasalahan tersebut antara lain masih terjadinya praktik-praktik KKN dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi dan berkualitas. Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, pembangunan aparatur negara diarahkan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur

negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Reformasi birokrasi sebagai bagian dari pembangunan nasional pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan nasional Indonesia, yaitu "**INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**". Dalam kaitan tersebut, visi reformasi birokrasi Indonesia adalah "*Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia*". Makna visi tersebut adalah terwujudnya pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Tantangan dan peluang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung adalah terkait langsung dengan salah satu program dari 11 (Sebelas) program tingkat mikro reformasi birokrasi yaitu *Program Pembinaan Perangkat Daerah* dalam pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Perangkat Desa. Tantangan dan masalah dalam

Mewujudkan pelayanan publik yang prima dapat dikatakan sangat kompleks, mulai dari intelektual SDM Perangkat desa, penilaian kinerja perangkat desa, terbatasnya dana, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan dalam program ini yang diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Sijuk pada Bab II, maka berikut adalah pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|---|---|
| 01. | Belum optimalnya tatakelola pelayanan publik | Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dalam Pemenuhan Pelayanan Publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM Kecamatan. 2. Belum Memadai Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik |
| | | Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang social, keagamaan, olahraga, kesehatan, keamanan dan ketertiban . 2. Kurang aktifnya Lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk. 3. Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi Masyarakat dengan kecamatan. |
| | | Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kapasitas aparatur perangkat Desa. |

3.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Belitung periode 2018-2023. Kabupaten Belitung salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2023 akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah di Kabupaten Belitung.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi Daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka disusunlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.

Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 dengan **tujuan RPD yaitu “Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”** dengan **sasaran RPD yaitu “Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel”** melalui strategi **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”** dan arah kebijakan **peningkatan tata kelola pelayanan publik.**

Terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024-2026 yaitu:

- a. Faktor Penghambat
 - 1. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan;
 - 2. Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.
- b. Faktor Pendorong
 - 1) Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
 - 2) Banyaknya kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROPINSI.

7.3.1 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Renstra Kecamatan Sijuk mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2021- 2026 antara lain adalah :

- 1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
- 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
- 3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
- 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
- 5. Meningkatnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
- 6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
- 7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat
- 8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan

9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional
10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri
11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintahan Dalam Negeri
12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi

Berdasarkan sasaran Kementerian/Lembaga diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran no 4).

Faktor-faktor yang menghambat pelayanan pada Kecamatan Sijuk ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L:

1. Belum efektifnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan Kecamatan-Desa
2. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif baik di Kecamatan maupun di Desa.

Sedangkan Faktor-faktor Pendorong peningkatan pelayanan pada Kecamatan Sijuk ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L:

1. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan dan desa.
2. Banyaknya kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034, yang bertujuan untuk “Mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sector unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan dan pariwisata serta

sector penunjang lainnya". Kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Belitung, antara lain :

- a. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten;
- b. Pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten;
- d. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Pengembangan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- f. Penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten.

Perangkat Daerah harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Indikator yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup tersebut antara lain:

- a. Indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan beresiko tinggi.
- b. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
- c. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
- d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
- e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
- f. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
- g. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
- h. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
- i. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
- j. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
- k. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
- l. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

- m. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
- n. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat darah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :

Faktor Penghambat

1. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup
2. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah
3. Masih belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian SDGs

Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS
2. Secara tata ruang wilayah kecamatan sijuk merupakan daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIJUK

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung pada tahun 2024 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Belitung.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu isu strategis yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan pengembangan pelayanan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Belum Optimal.

Hingga saat ini Kecamatan Sijuk masih melaksanakan Standar Pelayanan yang belum megarah ke Pelayanan PATEN. Data Survey Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2022 Nilainya 87,32, sedangkan tahun 2021 Nilainya : (90,41) dan tahun 2020 Nilainya : (91,37).

Melaksanakan dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat Sesuai Prosedur dan Persyaratan dalam bentuk Standar Operasional (SOP).

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mandiri hingga masyarakat dapat membentuk kelompok yang produktif dan dapat mendukung perekonomian masyarakat dan Desa sehingga tidak tergantung lagi dengan bantuan Pemerintah. Serta memacu masyarakat Desa untuk berpikir dan bertindak kreatif seperti menciptakan Teknologi Tepat Guna yang bermanfaat dan dapat bernilai ekonomis.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sehingga usulan prioritas Pembangunan dari Desa dapat dibahas di forum Musrenbang

Kecamatan sehingga usulan masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui ditingkat Kabupaten dan Propinsi.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan tujuannya adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran digambarkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Sijuk Tahun 2024 – 2026

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET | | |
|-----|---|---|--|--------|------|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan | Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sumber data : Laporan SKM dari Bag. Organisasi Setda | 3.50 | 3.55 | 3.60 |
| | | Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa Rumusan : Jumlah Jenis Pemberdayaan | 85% | 90% | 90% |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|
| | | <p>masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berkenaan / Jumlah Jenis Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan X 100%</p> <p>Ket. Jenis bagi untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan 2. Perlombaan 3. Pelatihan 4. Promosi 5. Festival 6. Sosialisasi 7. Even Keagamaan 8. Forum | | | | |
| | | <p>Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Desa</p> <p>Rumusan : (Jumlah Desa beradministrasi Baik / Jumlah Desa dalam lingkup Kecamatan) x 100 %</p> <p>Keterangan : Desa yang beradministrasi baik adalah Desa yang menyusun APBDes (induk dan perubahan), RKP Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang menjadi Kewenangan Kecamatan.</p> | <p>Persentase Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku</p> | 100 | 100 | 100 |

4.2 CASCADING KINERJA KECAMATAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 - 2026

Adapun Cascading Kinerja Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan Program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sijuk Tahun 2024 – 2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Sijuk, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengembangkan tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sijuk, dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkret dan operasional.

Pada Bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Kecamatan Sijuk Tahun 2024-2026, Yaitu “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah ”

Uapaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan Sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kec. Sijuk

| Tujuan RPD | Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| Sasaran RPD | Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel | | | | |
| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Peningkatan kinerja pelayanan di kecamatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi SDM Kecamatan 2. Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan |
| | | Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa | peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang social, keagamaan, olahraga, kesehatan, keamanan dan ketertiban, dll 2. meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk 3. meningkatkan koordinasi antara lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Desa | Persentase Desa beradminist rasi baik sesuai ketentuan yang berlaku | Peningkatan Jumlah Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku | 1.Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa |
|--|--|--|---|--|--|

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN.**

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung tahun 2024–2026 yang disertai dengan indikator capaian yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Berikut rencana program dan kegiatan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026:

A. Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator program yaitu:

1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.

Definisi operasional: (Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan/jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan) x 100% dengan kegiatannya sebagai berikut :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indicatorynya adalah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kegiatannya adalah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah.

2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah

Definisi operasional: sesuai perhitungan rumusan Peraturan Kepala BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Indeks profesionalitas ASN sesuai dengan form pengukuran indeks profesionalitas ASN dengan kegiatannya sebagai berikut:

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikatornya adalah Kinerja Aparatur yang baik.
3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

Definisi operasional: Rata-rata capaian pelayanan administrasi perkantoran (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indicator kegiatan adalah terpenuhunya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indicatornya adalah pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.

4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Definisi operasional: Rata-rata capaian pemenuhan sarana prasarana aparatur (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indicatornya adalah Jenis barang milik daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikatornya adalah Barang milik daerah dalam kondisi baik.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator program yaitu: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Definisi operasional: (Jumlah pemberdayaan masyarakat yang diikuti / jumlah pemberdayaan masyarakat yang ada) x 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikatornya adalah Laporan Hasil Pemberdayaan Desa.

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator program yaitu: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Definisi operasional: (Jumlah hasil koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan yang dilaksanakan/ Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan) x 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan indikatornya adalah Laporan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah.

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator program yaitu: Persentase desa dan atau Kelurahan taat administrasi.

Definisi operasional: (Jumlah Desa dan/atau Kelurahan taat administrasi/Jumlah Desa dan/atau Kelurahan) x100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan indikatornya adalah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sijuk.

Secara harfiah, definisi dari program adalah penjabaran kebijakan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2024-2026, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung menetapkan 4 (Empat) Program dan 11 (sebelas) kegiatan yang merupakan instrumen kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana *strategic* yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta dan misi dan visi pemerintah daerah.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pada awalnya mengalami penyesuaian yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan sebagai pedoman operasional kegiatan selanjutnya. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Sijuk dapat dilihat pada tabel 6.1 terlampir.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | | |
|--------|---|---|------------------------------------|--|--|---|--------|-----------|---------------|-----------|---------------|---|----------------|----------------------------------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir) | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | |
| 1.1. | Meningkatnya tata kelola pelayanan publik | 1.1.1. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dalam pemenuhan | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 3,50% | | 3,55% | | 3,60% | | 3,60% | | | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan | 7 01 01 2.01 | 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA. | 1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah 4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | - | 100% | 100% | 5.128.700.000 | 100% | 4.659.500.000 | 100% | 14.287.700.000 | | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | 7 01 01 2.01 | 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Keluaran Dokumen Hasil perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 11 Dok | 11 Dok | 12.000.000 | 11 Dok | 12.000.000 | 33 Dok | 36.000.000 | | | | |
| | | | 7 01 01 2.01 01 | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 3 Dok | 3.000.000 | 3 Dok | 3.000.000 | 3 Dok | 3.000.000 | 9 Dok | 9.000.000 | | | |
| | | | 7 01 01 2.01 02 | 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Keluaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | 1 Dok | 1.500.000 | 1 Dok | 1.500.000 | 1 Dok | 1.500.000 | 3 Dok | 4.500.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | 7 01 01 2.01 03 | 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Keluaran Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil | - | 1 Dok | 1.500.000 | 1 Dok | 1.500.000 | 1 Dok | 1.500.000 | 3 Dok | 4.500.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---|--|----------|--|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|--|
| | | | | 7.01.01.2.0.04 | 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Keluaran | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | - | 1Dok | 1.500.000 | 1Dok | 1.500.000 | 1Dok | 1.500.000 | 3 Dok | 4.500.000 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.0.05 | 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Keluaran | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | 1Dok | 1.500.000 | 1Dok | 1.500.000 | 1Dok | 1.500.000 | 3 Dok | 4.500.000 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.0.06 | 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 1Laporan | 1.500.000 | 1Laporan | 1.500.000 | 1Laporan | 1.500.000 | 3 Laporan | 4.500.000 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.0.07 | 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Keluaran | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 3 Laporan | 3.000.000 | 3 Laporan | 3.000.000 | 3 Laporan | 3.000.000 | 3 Laporan | 3.000.000 | | | |
| 7.01.01.2.0.2 | | | | 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Peraangkat Daerah | | Keluaran | Dokumen kesanggupan Perangkat Daerah | - | 4 Dok | 3.004.500.000 | 4 Dok | 3.204.500.000 | 4 Dok | 3.304.500.000 | 12 Dok | 9.513.500.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | | | | Hasil | Terpenuhinya Dokumen Keuangan sesuai Peraturan | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.0.01 | 1. Penyedian Gaji dan Tunjungan ASN | Keluaran | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjungan ASN | - | 21 Orang / Bulan | 3.000.000.000 | 21 Orang / Bulan | 3.200.000.000 | 21 Orang / Bulan | 3.300.000.000 | 63 Orang/ bulan | 3.500.000.000 | | | |
| | | | | 7.01.01.2.0.05 | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Keluaran | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | 1Laporan | 1.500.000 | 1Laporan | 1.500.000 | 1Laporan | 1.500.000 | 3 laporan | 4.500.000 | | | |
| | | | | 7.01.02.2.0.08 | 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Keluaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | 2 Dok | 3.000.000 | 2 Dok | 3.000.000 | 2 Dok | 3.000.000 | 6 Dok | 3.000.000 | | | |
| 7.01.02.2.0.5 | | | | 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Keluaran | Terpenuhinya Administrasi Pegawai | - | 31 Orang | 103.500.000 | 31 Orang | 103.500.000 | 31 Orang | 103.500.000 | 93 Orang | 328.500.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | | | | Hasil | Iadeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.0.02 | 1. Pengadaan Paket Dinas berserta Atribut Kelengkapan | Keluaran | Jumlah Paket Paket Dinas berserta Atribut Kelengkapan | - | 1Paket | 19.500.000 | 1Paket | 19.500.000 | 1Paket | 19.500.000 | 105 Stel | 58.500.000 | | | |
| | | | | 7.01.02.2.0.03 | 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Keluaran | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | 6 Orang | 30.000.000 | 6 Orang | 30.000.000 | 6 Orang | 30.000.000 | 18 Orang | 270.000.000 | | | |
| 7.01.02.2.0.6 | | | | 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Keluaran | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | 20 Paket | 379.000.000 | 20 Paket | 347.500.000 | 20 Paket | 351.000.000 | 100 Paket | 1.077.500.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | | | | Hasil | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.0.01 | 1. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | - | 1Paket | 20.000.000 | 1Paket | 17.500.000 | 1Paket | 20.000.000 | 3 Paket | 57.500.000 | | | |
| | | | | 7.01.02.2.0.02 | 2. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | - | 2Paket | 60.000.000 | 2Paket | 50.000.000 | 2 Paket | 50.000.000 | 6 Paket | 160.000.000 | | | |
| | | | | 7.01.02.2.0.03 | 3. Penyedian Peralatan Rumah Tangga | Keluaran | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | - | 1Paket | 8.000.000 | 1Paket | 3.000.000 | 1Paket | 10.000.000 | 3 Paket | 27.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----|----|------|------|--|---|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | 7 | 01 | 02 | 2.06 | 04 | 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Keluaran | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | - | 2 Paket | 140.000.000 | 2 Paket | 120.000.000 | 2 Paket | 120.000.000 | 6 Paket | 360.000.000 | | | | |
| | | | | 7 | 01 | 02 | 2.06 | 05 | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian | Keluaran | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggantian yang disediakan | - | 1 Paket | 20.000.000 | 1 Paket | 20.000.000 | 1 Paket | 20.000.000 | 3 Paket | 60.000.000 | | | | |
| | | | | 7 | 01 | 02 | 2.06 | 06 | 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | Keluaran | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan | - | 1 Dok | 6.000.000 | 1 Dok | 6.000.000 | 1 Dok | 6.000.000 | 3 Dok | 18.000.000 | | | | |
| | | | | 7 | 01 | 02 | 2.06 | 03 | 7. Penyelenggaran Rapot-Rapot Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Keluaran | Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapot Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 12 Laporan | 125.000.000 | 12 Laporan | 125.000.000 | 12 Laporan | 125.000.000 | 36 Laporan | 375.000.000 | | | | |
| | | | | 7 | 01 | 02 | 2.07 | | 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Keluaran | Jenis Barang Milik Daerah | - | 45 Unit | | 60 Unit | | 10 Unit | | 115 Unit | | 1.600.700.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | | | | | | | | Hasil | Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Aparatur | - | 100% | 579.000.000 | | 684.700.000 | | 337.000.000 | | 100% | | | | |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | 2.07 | 01 | 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Keluaran | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | - | 3 Unit | 150.000.000 | 1 Unit | 600.000.000 | 3 Unit | 150.000.000 | 7 unit | 900.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | 2. Pengadaan Mebel | Keluaran | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | - | 32 Unit | 73.000.000 | 50 Unit | 30.000.000 | 2 Unit | 20.000.000 | 84 unit | 123.000.000 | | | | |
| | | | | | | | | | 3. Pengadaan Perlatalan dan Mesin Listinya | Keluaran | Jumlah Unit Perlatalan dan Mesin Listinya yang disediakan | - | 7 Unit | 36.000.000 | 9 Unit | 54.700.000 | 4 Unit | 162.000.000 | 20 Unit | 252.700.000 | | | | |
| | | | | | | | | | 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Listinya | Keluaran | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Listinya yang disediakan | - | 11 Unit | 300.000.000 | - | - | - | - | 1 unit | 300.000.000 | | | | |
| | | | | | | | | | 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Listinya | Keluaran | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Listinya yang disediakan | - | 2 Unit | 20.000.000 | - | - | 1 Unit | 5.000.000 | 3 Unit | 25.000.000 | | | | |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | 2.08 | | 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Keluaran | Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran | - | 36 Laporan | | 36 Laporan | | 36 Laporan | | 108 Laporan | | 686.500.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk |
| | | | | | | | | | Hasil | Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah | - | 100% | 220.500.000 | | 230.500.000 | | 235.500.000 | | 100% | | | | | |
| | | | | | | 7 | 01 | 02 | 2.08 | 01 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 12 Laporan | 500.000 | 12 Laporan | 500.000 | 12 Laporan | 500.000 | 36 Laporan | 1.500.000 | | |
| | | | | | | | | | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | - | 12 Laporan | 35.000.000 | 12 Laporan | 35.000.000 | 12 Laporan | 35.000.000 | 36 Laporan | 105.000.000 | | | | |
| | | | | | | | | | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | - | 12 Laporan | 185.000.000 | 12 Laporan | 195.000.000 | 12 Laporan | 200.000.000 | 36 Laporan | 580.000.000 | | | | |
| | | | | | 7 | 01 | 02 | 2.09 | | 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Keluaran | Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik | - | 59 Unit | | 62 Unit | | 64 Unit | | 185 Unit | | 1.045.000.000 | | |
| | | | | | | | | | Hasil | kelancaran operasional kantor | - | 100% | 195.000.000 | | 540.000.000 | | 310.000.000 | | 100% | | | | | |
| | | | | | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Keluaran | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | - | 10 Unit | 50.000.000 | 13 Unit | 60.000.000 | 14 Unit | 70.000.000 | 33 Unit | 180.000.000 | | |
| | | | | | | | | | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Keluaran | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | 3 unit | 50.000.000 | 3 unit | 50.000.000 | 3 unit | 50.000.000 | 3 Unit | 150.000.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----|----|------|----|--|---|--|------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------|--|
| | | | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 06 | 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kelurahan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | - | 45 Unit | 35.000.000 | 45 Unit | 30.000.000 | 45 Unit | 30.000.000 | 225 Unit | 35.000.000 | | |
| | | | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | Kelurahan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | - | 1 Unit | 60.000.000 | 1 Unit | 400.000.000 | 1 Unit | 60.000.000 | 5 Unit | 520.000.000 | | |
| | | | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 10 | 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | - | - | - | - | - | 1 unit | 100.000.000 | 1 unit | 100.000.000 | | |
| | | | | 7 | 01 | 03 | | | 2. PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Percentase Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | 85% | 302.325.000 | 90% | 302.325.000 | 90% | 302.325.000 | 90% | 906.975.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kelurahan | 1. Dokumen hasil Musrebang | - | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 87.650.000 | 87.650.000 | 87.650.000 | 87.650.000 | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 262.950.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | 2. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat | Hasil | Pemberdayaan Desa Terkoordinasi Dengan Baik | - | 1 Laporan | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Muayawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Muayawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 17.500.000 | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 17.500.000 | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 17.500.000 | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 52.500.000 | | |
| | | | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | 2. Peningkata Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kelurahan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | 1 laporan | 70.150.000 | 1 laporan | 70.150.000 | 1 laporan | 70.150.000 | 3 laporan | 210.450.000 | | |
| | | | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan | - | 6 Pemberdayaan | 214.675.000 | 214.675.000 | 214.675.000 | 214.675.000 | 18 Pemberdayaan | 644.025.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Hasil | Kecamatan | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terselenggarakan dengan | - | 85% | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | 1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan | - | 3 lembaga kemasyarakatan | 26.775.000 | 3 lembaga kemasyarakatan | 26.775.000 | 3 lembaga kemasyarakatan | 26.775.000 | 9 lembaga kemasyarakatan | 80.325.000 | | |
| | | | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 04 | 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kelurahan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | - | 2 laporan | 168.200.000 | 2 laporan | 168.200.000 | 2 laporan | 168.200.000 | 6 laporan | 504.600.000 | | |
| | | | | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 05 | 3. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kelurahan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | - | 1 laporan | 19.700.000 | 1 laporan | 19.700.000 | 1 laporan | 19.700.000 | 3 laporan | 59.100.000 | | |
| | | | | 7 | 01 | 05 | | | 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN | Percentase Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum | - | 100% | 741.850.000 | 100% | 741.850.000 | 100% | 741.850.000 | 100% | 2.225.550.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | 1. Kegiatan Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengangsa Kepala Daerah | Kelurahan | Laporan Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengangsa Kepala Daerah | - | 2750 Orang | 741.850.000 | 741.850.000 | 741.850.000 | 741.850.000 | 8250 Orang | 2.225.550.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Hasil | Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengangsa Kepala Daerah | - | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | 1. Pembinaan Perseutan dan Kesatuan Bangsa | Kelurahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perseutan dan Kesatuan Bangsa | - | 2250 Orang | 393.200.000 | 2250 Orang | 393.200.000 | 2250 Orang | 393.200.000 | 6750 Orang | 1.179.600.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----|----|------|----|--|-----------------------------------|---|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | 2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional | Keluaran | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | - | 500 Orang | 348.650.000 | 500 Orang | 348.650.000 | 500 Orang | 348.650.000 | 1500 Orang | 1.045.350.000 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Desa | 7 | 01 | 06 | | | 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWARAN PEMERINTAHAN | Percentase Desa Tait Administrasi | | - | 100% | 93.050.000 | 100% | 117.150.000 | 100% | 117.150.000 | 100% | 327.350.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk |
| | | | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | 1. Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Keluaran | Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | 1 Dok | | 1 Dok | | 1 Dok | | 3 Dok | | | |
| | | | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | 1. Fasilitasi Administrasi Toto Pemerintahan Desa | Keluaran | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Toto Pemerintahan Desa | - | 1 Dok | 27.050.000 | 1 Dok | 27.050.000 | 1 Dok | 27.050.000 | 3 Dok | 81.150.000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk |
| | | | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Keluaran | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | - | 1 Dok | 25.000.000 | 1 Dok | 25.000.000 | 1 Dok | 25.000.000 | 3 Dok | 75.000.000 | | |
| | | | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 06 | 3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Keluaran | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | - | - | - | 1 Dok | 24.100.000 | 1 Dok | 24.100.000 | 2 Dok | 48.200.000 | | |
| | | | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 07 | 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Keluaran | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | - | 1 Dok | 3.500.000 | 1 Dok | 3.500.000 | 1 Dok | 3.500.000 | 3 Dok | 10.500.000 | | |
| | | | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 09 | 5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa | Keluaran | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | - | 2 Dok | 37.500.000 | 3 Dok | 37.500.000 | 3 Dok | 37.500.000 | 8 Dok | 112.500.000 | | |
| | | | Catatan | | | | | | | | | | | 5.636.725.000 | | 6.290.025.000 | | 5.820.825.000 | | 17.747.575.000 | | |

Page 5

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Belitung dengan Dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Belitung, Kecamatan Badau berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Badau menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Dari beberapa sasaran yang telah disusun, terdapat beberapa indikator sasaran yang secara eksplisit mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 yang tertuang pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPD

| NO. | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | Target Kinerja pada awal Periode Restra Tahun 2022 | TARGET | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|-----|---|---|--------|------|------|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (4) | (5) | (6) | (7) | | |
| 1. | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 3,50 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3,60 |
| | Persentase Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa | 80 % | 85% | 90% | 90% | 90 % |
| | Persentase Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku. | 80 % | 100% | 100% | 100% | 100 % |

Rencana Strategis Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk telah sesuai dengan **Peraturan Bupati Belitung Nomor** 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan untuk memastikan pencapaian kinerja strategis Kecamatan Sijuk, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan arahan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan selanjutnya sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan perangkat daerah.

Jika di kemudian hari terdapat penyesuaian kebijakan pembangunan yang berdampak terhadap rencana strategis perangkat daerah maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungpandan, April 2023

CAMAT SIJUK,

FEBRIANSYAH, S.STP
NIP. 198702132006021001

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | | |
|--------|---|---|------------------------------------|--|--|--|---|-----------|-----------|------------|-----------|---|-----------|----------------------------------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir) | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | |
| 1.1. | Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan | 1.1.1. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dalam pemenuhan standar | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 3.50% | | 3.55% | | 3.60% | | 3.60% | | | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan | 7 01 01 2.01 | 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA. | 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Keluaran | Dokumen Hasil perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 11 Dok | 12,000,000 | 11 Dok | 12,000,000 | 33 Dok | 36,000,000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | | 7 01 01 2.01 01 | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 3 Dok | 3,000,000 | 3 Dok | 3,000,000 | 3 Dok | 3,000,000 | 9 Dok | 9,000,000 | | |
| | | | 7 01 01 2.01 02 | 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Keluaran | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | 1 Dok | 1,500,000 | 1 Dok | 1,500,000 | 1 Dok | 1,500,000 | 3 Dok | 4,500,000 | | |
| | | | 7 01 01 2.01 03 | 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Keluaran | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | 1 Dok | 1,500,000 | 1 Dok | 1,500,000 | 1 Dok | 1,500,000 | 3 Dok | 4,500,000 | | |
| | | | 7 01 01 2.01 04 | 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Keluaran | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | - | 1 Dok | 1,500,000 | 1 Dok | 1,500,000 | 1 Dok | 1,500,000 | 3 Dok | 4,500,000 | | |
| | | | 7 01 01 2.01 05 | 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Keluaran | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | 1 Dok | 1,500,000 | 1 Dok | 1,500,000 | 1 Dok | 1,500,000 | 3 Dok | 4,500,000 | | |
| | | | 7 01 01 2.01 07 | 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Keluaran | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 3 Laporan | 3,000,000 | 3 Laporan | 3,000,000 | 3 Laporan | 3,000,000 | 9 Laporan | 9,000,000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-----------------|--|---|--|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|---------------|----------------------------------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir) | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | |
| | | 7 01 01 2.02 | 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Keluaran Dokumen keuangan Perangkat Daerah | - | 4 Dok | 3,004,500,000 | 4 Dok | 3,204,500,000 | 4 Dok | 3,304,500,000 | 12 Dok | 9,513,500,000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | | |
| | | 7 01 01 2.02 01 | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Keluaran | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | 7 01 01 2.02 05 | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Keluaran | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | 1 laporan | 1,500,000 | 1 laporan | 1,500,000 | 1 laporan | 1,500,000 | 3 laporan | 4,500,000 | | | |
| | | 7 01 02 2.02 08 | 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Keluaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - | 2 Dok | 3,000,000 | 2 Dok | 3,000,000 | 2 Dok | 3,000,000 | 6 Dok | 9,000,000 | | | |
| | | 7 01 02 2.05 | 3. Kegiatan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah | Keluaran Terpenuhinya Administrasi Pegawai | - | 31 Orang | 109,500,000 | 31 Orang | 109,500,000 | 31 Orang | 109,500,000 | 93 Orang | 328,500,000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | | |
| | | 7 01 02 2.05 02 | 1. Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Hasil Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | 7 01 02 2.05 09 | 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Keluaran | Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | 1 Paket | 19,500,000 | 1 Paket | 19,500,000 | 1 Paket | 19,500,000 | 105 Stel | 58,500,000 | | | |
| | | 7 01 02 2.06 | 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Keluaran Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah. | - | 20 Paket | 379,000,000 | 20 Paket | 347,500,000 | 20 Paket | 351,000,000 | 60 Paket | 1,077,500,000 | | | | |
| | | 7 01 02 2.06 01 | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hasil Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | 7 01 02 2.06 02 | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Keluaran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | - | 1 Paket | 20,000,000 | 1 Paket | 17,500,000 | 1 Paket | 20,000,000 | 3 Paket | 57,500,000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | |
| | | 7 01 02 2.06 03 | 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | - | 2 Paket | 60,000,000 | 2 Paket | 50,000,000 | 2 Paket | 50,000,000 | 6 Paket | 160,000,000 | | | |
| | | 7 01 02 2.06 04 | 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Keluaran | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | - | 1 Paket | 8,000,000 | 1 Paket | 9,000,000 | 1 Paket | 10,000,000 | 3 Paket | 27,000,000 | | | |
| | | 7 01 02 2.06 05 | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Keluaran | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | - | 2 Paket | 140,000,000 | 2 Paket | 120,000,000 | 2 Paket | 120,000,000 | 6 Paket | 380,000,000 | | | |
| | | 7 01 02 2.06 06 | 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundungan | Keluaran | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | - | 1 Paket | 20,000,000 | 1 Paket | 20,000,000 | 1 Paket | 20,000,000 | 3 Paket | 60,000,000 | | | |
| | | 7 01 02 2.06 09 | 7. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Keluaran | Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundungan yang disediakan | - | 1 Dok | 6,000,000 | 1 Dok | 6,000,000 | 1 Dok | 6,000,000 | 3 Dok | 18,000,000 | | | |
| | | 7 01 02 2.07 | 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Keluaran Jenis Barang Milik Daerah | - | 45 Unit | 579,000,000 | 60 Unit | 684,700,000 | 10 Unit | 337,000,000 | 115 Unit | 1,600,700,000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | | |
| | | 7 01 02 2.07 02 | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Hasil Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Aparatur | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | 7 01 02 2.07 05 | 2. Pengadaan Mebel | Keluaran | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang disediakan | - | 3 Unit | 150,000,000 | 1 Unit | 600,000,000 | 3 Unit | 150,000,000 | 7 unit | 900,000,000 | | | |
| | | 7 01 02 2.07 06 | 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | - | 32 Unit | 73,000,000 | 50 Unit | 30,000,000 | 2 Unit | 20,000,000 | 84 unit | 123,000,000 | | | |
| | | 7 01 02 2.07 09 | 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | - | 7 Unit | 36,000,000 | 9 Unit | 54,700,000 | 4 Unit | 162,000,000 | 20 Unit | 252,700,000 | | | |
| | | 7 01 02 2.07 10 | 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Keluaran | Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | - | 1 Unit | 300,000,000 | - | - | - | 1 Unit | 5,000,000 | 300,000,000 | | | |
| | | | | | | - | 2 Unit | 20,000,000 | - | - | - | 1 Unit | 5,000,000 | 25,000,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | | |
|--------|--|-----------------|--|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|--------|--|--|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir) | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | |
| | | 7 01 02 2.08 | 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Keluaran Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran | - | 36 Laporan | 220,500,000 | 36 Laporan | 230,500,000 | 36 Laporan | 235,500,000 | 108 Laporan | 686,500,000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | | |
| | | 7 01 02 2.08 01 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hasil Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | |
| | | 7 01 02 2.08 02 | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | - | 12 Laporan | 500,000 | 12 Laporan | 500,000 | 12 Laporan | 500,000 | 36 Laporan | 1,500,000 | | | | |
| | | 7 01 02 2.08 04 | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | - | 12 Laporan | 185,000,000 | 12 Laporan | 195,000,000 | 12 Laporan | 200,000,000 | 36 Laporan | 580,000,000 | | | | |
| | | 7 01 02 2.09 | 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Keluaran Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik | - | 59 Unit | 195,000,000 | 62 Unit | 540,000,000 | 64 Unit | 310,000,000 | 185 Unit | 1,045,000,000 | | | | |
| | | 7 01 02 2.09 01 | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hasil kelancaran operasional kantor | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | |
| | | 7 01 02 2.09 02 | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Keluaran Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | 10 Unit | 50,000,000 | 13 Unit | 60,000,000 | 14 Unit | 70,000,000 | 39 Unit | 180,000,000 | | | | |
| | | 7 01 02 2.09 06 | 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | - | 3 unit | 50,000,000 | 3 unit | 50,000,000 | 3 unit | 50,000,000 | 9 Unit | 150,000,000 | | | | |
| | | 7 01 02 2.09 09 | 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | Keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | - | 45 Unit | 35,000,000 | 45 Unit | 30,000,000 | 45 Unit | 30,000,000 | 225 Unit | 95,000,000 | | | | |
| | | 7 01 02 2.09 10 | 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | - | 1 Unit | 60,000,000 | 1 Unit | 400,000,000 | 1 Unit | 60,000,000 | 5 Unit | 520,000,000 | | | | |
| | | 7 01 03 | 2. PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | 85% | 302,325,000 | 90% | 302,325,000 | 90% | 302,325,000 | 90% | 906,975,000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | | |
| | Meningkatnya kualitas pemberdayaan Masyarakat Desa | 7 01 03 2.01 | 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Keluaran Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | 2 Dokumen | 87,650,000 | 2 Dokumen | 87,650,000 | 2 Dokumen | 87,650,000 | 6 Dokumen | 262,950,000 | Kecamatan Sijuk | Sijuk | | |
| | | 7 01 03 2.01 01 | 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Hasil Pemberdayaan Desa Terkoordinasi Dengan Baik | - | 85% | | 90% | | 90% | | 90% | | | | | |
| | | 7 01 03 2.01 03 | 2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Keluaran Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | 1 laporan | 70,150,000 | 1 laporan | 70,150,000 | 1 laporan | 70,150,000 | 3 laporan | 210,450,000 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | | |
|--------|--|-----------------|---|---|--|---|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|--------|-----------------|--|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir) | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | |
| | | 7 01 03 2.03 | 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Keluaran Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan | - | Pemberdayaan | 6 Pemberdayaan | | | | | 18 Pemberdayaan | | 644,025,000 | | | |
| | | 7 01 03 2.03 01 | 1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Keluaran Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan | - | 3 lembaga kemasyarakatan | 26,775,000 | 3 lembaga kemasyarakatan | 26,775,000 | 3 lembaga kemasyarakatan | 26,775,000 | 9 lembaga kemasyarakatan | 80,325,000 | | | | |
| | | 7 01 03 2.03 04 | 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | - | 2 laporan | 168,200,000 | 2 laporan | 168,200,000 | 2 laporan | 168,200,000 | 6 laporan | 504,600,000 | | | | |
| | | 7 01 03 2.03 05 | 3. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | - | 1 laporan | 19,700,000 | 1 laporan | 19,700,000 | 1 laporan | 19,700,000 | 3 laporan | 59,100,000 | | | | |
| | Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7 01 05 | 3. PROGRAM PENYELINGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | - | 100% | 741,850,000 | 100% | 741,850,000 | 100% | 741,850,000 | 100% | 2,225,550,000 | | | | |
| | | 7 01 05 2.01 | 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Keluaran Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | 1 Dok | 741,850,000 | 1 Dok | 741,850,000 | 1 Dok | 741,850,000 | 3 Dok | 2,225,550,000 | | | | |
| | | 7 01 05 2.01 03 | 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | - | 2250 Orang | 393,200,000 | 2250 Orang | 393,200,000 | 2250 Orang | 393,200,000 | 6750 Orang | 1,179,600,000 | | | Kecamatan Sijuk | |
| | | 7 01 05 2.01 04 | 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional | Keluaran Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | - | 500 Orang | 348,650,000 | 500 Orang | 348,650,000 | 500 Orang | 348,650,000 | 1500 Orang | 1,045,950,000 | | | | |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Desa | 7 01 06 | 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Tercapai Administrasi | - | 100% | 93,050,000 | 100% | 117,150,000 | 100% | 117,150,000 | 100% | 327,350,000 | | | Kecamatan Sijuk | |
| | | 7 01 06 2.01 | 1. Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Keluaran Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | 1 Dok | 93,050,000 | 1 Dok | 117,150,000 | 1 Dok | 117,150,000 | 3 Dok | 327,350,000 | | | | |
| | | 7 01 06 2.01 02 | 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Keluaran Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | - | 1 Dok | 27,050,000 | 1 Dok | 27,050,000 | 1 Dok | 27,050,000 | 3 Dok | 81,150,000 | | | | |
| | | 7 01 06 2.01 03 | 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Keluaran Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | - | 1 Dok | 25,000,000 | 1 Dok | 25,000,000 | 1 Dok | 25,000,000 | 3 Dok | 75,000,000 | | | Kecamatan Sijuk | |
| | | 7 01 06 2.01 06 | 3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Keluaran Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | - | - | - | 1 Dok | 24,100,000 | 1 Dok | 24,100,000 | 2 Dok | 48,200,000 | | | | |
| | | 7 01 06 2.01 07 | 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Keluaran Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | - | 1 Dok | 3,500,000 | 1 Dok | 3,500,000 | 1 Dok | 3,500,000 | 3 Dok | 10,500,000 | | | | |
| | | 7 01 06 2.01 09 | 5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa | Keluaran Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | - | 2 Dok | 37,500,000 | 3 Dok | 37,500,000 | 3 Dok | 37,500,000 | 8 Dok | 112,500,000 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|------------------------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---|------|----------------------------------|--------|--|--|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir) | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | |
| | | | | | | 5.636.725.000 | | 6.290.025.000 | | 5.820.825.000 | | 17.747.575.000 | | | | | |

CASCADING KINERJA KECAMATAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 - 2026

| | | Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|--|--|----------|--------------------|--|-------------------|--|-----------|--|---|--|-----------|---|---|--|--|
| OPD / ESelon II | Sasaran Strategis | Tujuan | | | | | | BUDANG ESelon III | | | | | | | | | | |
| | | Tujuan 1 | | | Tujuan 2 | | | Sasaran 1 | | | Sasaran 2 | | | Program | Sasaran 3 | | | |
| | | Tujuan 1 | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di Kecamatan Sijuk | | | Indikator Tujuan 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | Formulasi | IKM = (Total dari nilai per unsur / total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang | | | Sasaran 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik | | | |
| | | Indikator Sasaran 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | Formulasi | IKM = (Total dari nilai per unsur / total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang | | | | Indikator Sasaran 2 | Meningkatnya Kualitas pemberdayaan masyarakat Desa | | | Sasaran 3 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa | | |
| | | | Formulasi | | | | Percentase penyelelenggaran pemberdayaan masyarakat Desa | | | | Formulasi | (jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berkenaan / jumlah pemberdayaan masyarakat yang direncanakan) x 100% | | | Indikator Sasaran 3 | Percentase Desa Beradministrasi Baik Sesuai Ketentuan yang Berlaku | | |
| | | | Formulasi | | | | Percentase penyelelenggaran urusan pemerintahan umum | | | | | Formulasi | | | Formulasi | (jumlah desa yang beradministrasi baik / jumlah desa dalam lingkup kecamatan) x100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Terlaksananya desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indikator Program | Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indikator Program | 1. Percentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan 100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 76% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 2 | Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | Percentase Kualitas Pelayanan Perkantoran | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 3 | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indikator Program | Percentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | Percentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 4 | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Terlaksananya desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indikator Program | Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Terpenuhinya Dokumen Keuangan Sesuai Peraturan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indikator Program | 1. Terpenuhinya Dokumen Keuangan Sesuai Peraturan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | 2. Terpenuhinya Dokumen Keuangan Sesuai Peraturan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 2 | Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indikator Program | 1. Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | 2. Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 3 | Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indikator Program | 1. Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | 2. Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 4 | Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indikator Program | 1. Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | 2. Percentase Pemenuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 1 | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Terlaksananya desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indikator Program | Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 2 | Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indikator Program | 1. Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | 2. Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 3 | Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran Program | Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Indikator Program | 1. Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Formulasi | 2. Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Program 4 | Percentase desa taat administrasi | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan Indikator Target Anggaran | <p>Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>Indikator Sub Kegiatan</p> <p>Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>Formulasi Sub Kegiatan</p> <p>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>Target Sub Kegiatan</p> <p>Target Sub Kegiatan 3 Dokumen</p> <p>Anggaran Sub Kegiatan</p> <p>Anggaran Sub Kegiatan 4,500,000</p> |
| Sub Kegiatan 1.1.3 | Sub Kegiatan 1.2.3 |
| Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD | Penyusunan pelaporan dan analisis progresi realisasi anggaran |
| Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Terpenluhinya Dokumen Pelaporan dan Analisis Progresi Realisasi Anggaran |
| Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan |
| Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen Pelaporan dan Analisis Progresi Realisasi Anggaran |
| Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan |
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progresi Realisasi Anggaran |
| Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan |
| Target Sub Kegiatan 3 Dokumen | Target Sub Kegiatan 6 Dokumen |
| Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan |
| Anggaran Sub Kegiatan 4,500,000 | Anggaran Sub Kegiatan 9,000,000 |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|
| Sub Kegiatan 1.1.4 | Sub Kegiatan 1.4.4 | Sub Kegiatan 1.5.4 | Sub Kegiatan 1.6.3 | Sub Kegiatan 1.7.3 | Sub Kegiatan 2.2.3 | Sub Kegiatan 4.1.3 |
| Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Penyediaan bahan logistik kantor | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Penyediaan jasa peralatan rumah tangga | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
| Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Tersedianya peralatan rumah tangga | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenluhinya Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Terpenluhinya Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
| Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan |
| Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Bahan Logistik Kantor | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Peralatan Rumah Tangga | Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
| Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan |
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Bahan Logistik Kantor | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
| Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan |
| Target Sub Kegiatan 3 Dokumen | Target Sub Kegiatan 6 Paket | Target Sub Kegiatan 1 Unit | Target Sub Kegiatan 20 Unit | Target Sub Kegiatan 36 Laporan | Target Sub Kegiatan 225 Unit | Target Sub Kegiatan 2 Dokumen |
| Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan |
| Anggaran Sub Kegiatan 4,500,000 | Anggaran Sub Kegiatan 380,000,000 | Anggaran Sub Kegiatan 520,000,000 | Anggaran Sub Kegiatan 95,000,000 | Anggaran Sub Kegiatan 580,000,000 | Anggaran Sub Kegiatan 520,000,000 | Anggaran Sub Kegiatan 10,500,000 |
| Sub Kegiatan 1.1.5 | Sub Kegiatan 1.4.5 | Sub Kegiatan 1.5.5 | Sub Kegiatan 1.6.5 | Sub Kegiatan 1.7.4 | Sub Kegiatan 2.2.4 | Sub Kegiatan 4.1.4 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
| Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan | Sasaran Sub Kegiatan |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksanaanya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenluhinya Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Terpenluhinya Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
| Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan |
| Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Barang Cetak dan Penggandaan | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
| Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan |
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
| Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan |
| Target Sub Kegiatan 3 Dokumen | Target Sub Kegiatan 3 Paket | Target Sub Kegiatan 3 Unit | Target Sub Kegiatan 1 Unit | Target Sub Kegiatan 1 Unit | Target Sub Kegiatan 8 Dokumen | Target Sub Kegiatan 8 Dokumen |

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan |
| Laporkan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terpenluhinya Pengawali yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungi | Terpenluhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya paket mebel | Terpenluhinya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenluhinya Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar Pajak dan Perizinannya | Terpenluhinya orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
| Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan | Formulasi Sub Kegiatan |
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungi | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket mebel yang disediakan | Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar Pajak dan Perizinannya | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
| Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan | Target Sub Kegiatan |
| Target Sub Kegiatan 3 Dokumen | Target Sub Kegiatan 18 Orang | Target Sub Kegiatan 6 Paket | Target Sub Kegiatan 84 Unit | Target Sub Kegiatan 36 Laporan | Target Sub Kegiatan 9 Unit | Target Sub Kegiatan 1500 Orang |
| Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan | Anggaran Sub Kegiatan |
| Anggaran Sub Kegiatan 4,500,000 | Anggaran Sub Kegiatan 270,000,000 | Anggaran Sub Kegiatan 160,000,000 | Anggaran Sub Kegiatan 123,000,000 | Anggaran Sub Kegiatan 105,000,000 | Anggaran Sub Kegiatan 210,450,000 | Anggaran Sub Kegiatan 504,600,000 |

Terpenluhinya Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intraku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

| |
|---|
| Anggaran Sub Kegiatan |
| 4,500,000 |
| Sub Kegiatan 1.1.6 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sasaran Sub Kegiatan |
| Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Sub Kegiatan |
| Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Formulasi Sub Kegiatan |
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Target Sub Kegiatan |
| 9 Laporan |
| Anggaran Sub Kegiatan |
| 9,000,000 |

| |
|---|
| Anggaran Sub Kegiatan |
| 60,000,000 |
| Anggaran Sub Kegiatan |
| 25,000,000 |
| Sub Kegiatan 1.4.6 |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
| Sasaran Sub Kegiatan |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Indikator Sub Kegiatan |
| Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Formulasi Sub Kegiatan |
| Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Target Sub Kegiatan |
| 3 Dokumen |
| Anggaran Sub Kegiatan |
| 18,000,000 |

| |
|---|
| Anggaran Sub Kegiatan |
| 100,000,000 |
| Anggaran Sub Kegiatan |
| 112,500,000 |
| Sub Kegiatan 1.4.7 |
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD |
| Sasaran Sub Kegiatan |
| Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Indikator Sub Kegiatan |
| Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Formulasi Sub Kegiatan |
| Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Target Sub Kegiatan |
| 36 Laporan |
| Anggaran Sub Kegiatan |
| 375,000,000 |

sijuk. Oktober 2022
camat sijuk

FEBRIANSYAH, SSCP
Pembina
NIP. 198702132006021001

